



**EFEKTIVITAS PENERAPAN REGULASI *MISSION-DRIVEN*
PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

NENING FADHILAH ISTISEPTIARA

NIM 11000120140362

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PENERAPAN REGULASI *MISSION-DRIVEN*
TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

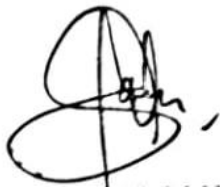
Oleh :

NENING FADHILAH ISTISEPTIARA

NIM 11000120140362

Tugas Akhir dengan judul di atas telah
disahkandan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Solechan, S.H., M.H
NIP 196709141993031002

Dosen Pembimbing II



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M. H
NIP 198105162003121001

HALAMAN PENGUJIAN

EFEKTIVITAS PENERAPAN REGULASI *MISSION-DRIVEN*
TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

Dipersiapkan dan disusun oleh :

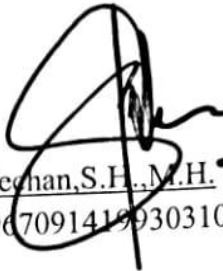
NENING FADIHLALISTISEPTIARA

NIM 11000120140362

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal...*12 Februari 2024*

Dewan Penguji

Ketua


Solechan, S.H., M.H.

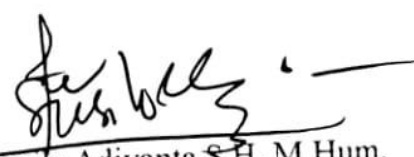
NIP 196709141993031002

Anggota Penguji II

Anggota Penguji I



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP 198105162003121001



F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.

NIP 196609111992031003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 19840709200812100

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Desember 2023



Nening Fadhilah Istiseptiara

11000120140362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama sesudah kesulitan itu ada kemudahan." - (Q.S. Al Insyirah : 5-6)
2. "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha." - (BJ. Habibie)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kedua orang tuaku dan keluarga besar yang sudah mendorong serta mendukung saya dalam penyelesaian tugas akhir-skripsi ini.
2. Dosen pembimbing saya yang selalu memberikan masukan dan arahan terhadap penulisan hukum saya sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Teman-teman yang turut serta memotivasi, mendukung, dan membantu penulisan hukum ini dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi yang berjudul “**Efektivitas Penerapan Regulasi *Mission-Driven* Terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.**” Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. tidak lupa penulis ucapkan terimakasih terhadap beberapa pihak karena atas bantuan dan bimbingannya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan saksama dan lancar, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Nanik Trihastuti,S.H., M.Hum., selaku dosen wali akademik
4. Bapak Solechan, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I pada skripsi saya yang telah membantu memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan hukum saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II pada skripsi saya yang juga telah membantu dan mendorong saya untuk mengoptimalkan penulisan hukum saya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

6. Kedua orang tua penulis, Iswar Aminuddin dan Listyati Purnama Rusdiana yang selalu memberikan nasehat serta masukan, dan atas kesabarannya dalam membina setiap langkah hidup penulis.
7. Kepada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah membantu, mempermudah, dan menghubungkan saya kepada direktorat terkait selama melakukan penelitian skripsi di LKPP.
8. Kepada Biro Hukum, Organisasi, dan SDM ; Direktorat Pengembangan Strategi, dan Kebijakan Pengadaan Umum; Direktorat Pasar Digital Pengadaan; Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang telah membantu saya dalam memberikan kebutuhan informasi terkait dengan penelitian skripsi saya dalam LKPP.
9. Seluruh staff LKPP yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Keluarga besar tercinta penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang mana kehadirannya menjadi pendukung dan pendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-teman sejawat yang turut memotivasi dan mendukung saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis sebagai pelengkap dalam segala kekurangan serta keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca.

Semarang, 30 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nening Fadhillah Istiseptiara'. The signature is stylized with many overlapping vertical and diagonal strokes.

Nening Fadhillah Istiseptiara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19
G. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Regulasi Mission-Driven.....	25

1. Pengertian Regulasi Mission-Driven.....	25
2. Penerapan Regulasi Mission-Driven.....	28
B. Proses Pengadaan Barang/Jasa	31
C. Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.....	40
D. Indikator Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Teori Value For Money dan Implementasi Kebijakan George Edward III.....	46
1. Teori Value For Money.....	46
2. Implementasi Kebijakan George Edward III.....	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Efektivitas Penerapan Regulasi <i>Mission-Driven</i> Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.....	51
B. Optimalisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dalam Penerapan Regulasi <i>Mission-Driven</i> Pada Proses Pengadaan Barang/jasa.....	79
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....	21
Tabel 2 Matriks Perbandingan Perbedaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.....	114
Tabel 3 Matriks Perbandingan Perbedaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Signifikansi Pencapaian E-Katalog 2018-2023.....	78
Gambar 2 Struktur Organisasi LKPP.....	93

ABSTRAK

Dengan adanya perubahan secara signifikan terhadap perkembangan teknologi tentunya menuntut manusia untuk melakukan perubahan dan penyesuaian zaman. Tidak hanya manusia tetapi, sebuah negara harus segera mentransformasikan pelayanan publiknya dari manual menjadi serba otomatis sehingga negara tidak mengalami ketertinggalan zaman. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat konsep *reinventing government* yang memperkenalkan regulasi berbasis dengan misi (*mission-driven*) untuk menarik instansi pemerintah dalam melakukan perubahan dengan segala inovasinya yang tidak selalu memperhatikan dari sisi prosedur saja namun juga sisi kebermanfaatannya termasuk pada salah satu sektor yakni Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait dengan efektivitas regulasi *mission-driven* terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam melakukan pengoptimalan terhadap implementasi kebijakan berbasis *mission-driven*.

Dalam karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif melalui spesifikasi penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP). Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis melalui metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi *mission-driven* menjadi pedoman yang efektif dalam pemecahan permasalahan dalam pengadaan barang/jasa. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menunjukkan perbedaan signifikan, khususnya dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi tematik, yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Regulasi ini dinilai mampu memberikan nilai *value* yang optimal, memastikan bahwa anggaran belanja digunakan dengan tepat sesuai dengan kualitas, kuantitas, lokasi, harga, dan waktu. Penelitian ini juga menyoroti upaya optimalisasi melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan memanfaatkan teori implementasi kebijakan George Edward III, dengan fokus pada komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi serta memastikan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar efektivitas. Peneliti memberikan saran untuk pihak LKPP untuk serius dalam menerapkan regulasi *mission-driven* yang kemudian mampu mewiraukahkan birokrasinya dengan menanamkan semangat wirausaha yang salah satunya yakni mampu mendeteksi adanya hal-hal yang menjadi hambatan maupun peluang bagi pengadaan barang/jasa di masa depan suatu negara dalam rangka terus menciptakan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dengan baik.

Kata Kunci : Mission-Driven; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ABSTRACT

With significant changes in technology development, mans are compelled to adapt to the evolving times. This adaptation is not only essential for individuals but also imperative for a nation to swiftly transform its public services from manual to fully automated, preventing it from falling behind. In line with this, the concept of reinventing government introduces the mission-driven regulations to engage government agencies in comprehensive and innovative changes. These changes go beyond procedural considerations, emphasizing the importance of broader benefits, including one specific sector, namely Government Procurement of Goods/Services. Consequently, this research explores the effectiveness of mission-driven regulations on Government Procurement of Goods/Services based on Presidential Regulation Number 12 of 2021, in optimizing the implementation of mission-driven policies.

In this academic papers, the research methodology employed is qualitative research using doctrinal research specifications. The data utilized consists of secondary data in the form of legal materials obtained through literature review and interviews with the Government Goods/Services Procurement Policy Institution (LKPP). The acquired data is then processed and analyzed using a descriptive-analytical method.

The results of this research demonstrate that the implementation of Mission-Driven regulations serving as a significant guide in addressing issues related to the procurement of goods/services. Compared to previous regulations such as Presidential Regulation Number 54 of 2010 and Presidential Regulation Number 16 of 2018, notable differences are observed, particularly in achieving thematic bureaucratic reform goals aimed at increasing the use of domestic products. This regulation is perceived to provide optimal value, ensuring that budget expenditures are utilized appropriately in terms of quality, quantity, location, price, and timing. The study also highlights optimization efforts through the Government Goods/Services Procurement Policy Institution (LKPP), utilizing George Edward III's policy implementation theory with a focus on communication, implementers' attitudes, resources, and bureaucratic structure also ensuring that procurement procedures align with needs effective standards. Researcher suggest that LKPP can be serious of implementing the mission-driven regulation which will be able to reinventing the government and be able to detect the future of Indonesia such the opportunities and the obstacles that will happen in the context of continue to create well-integrated procurement of goods/services.

**Keywords: Mission-Driven; Presidential Regulation Number 12 of 2021;
Government Procurement of Goods/Services.**